



INTISARI

Pertumbuhan perekonomian wilayah memicu permintaan lahan yang masif dan menyebabkan terjadinya alih fungsi atau perubahan tata guna lahan pertanian. Hal tersebut berlaku juga pada Kabupaten Kulon Progo dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yang sedang berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terlihat pada pembangunan beberapa Proyek Strategis Nasional. Beberapa regulasi telah ditetapkan untuk membatasi terjadinya fenomena perubahan tata guna lahan tersebut, namun hingga penelitian ini dibuat (2024) konversi lahan masih terus terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan beserta pelaksanaan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (LP2B) di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LP2B belum sepenuhnya dilakukan. Pelaksanaan kebijakan perlindungan LP2B dinilai kurang efektif sehingga pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Pangan melakukan upaya alternatif berupa sosialisasi persuasif dan prioritisasi subsidi.

Kata Kunci: LP2B, Alih Fungs Lahan, Kulon Progo



ABSTRACT

Regional economic growth triggers massive demand for land and causes conversion or changes in agricultural land use. This also applies to Kulon Progo Regency where the area is a developing area in the Special Region of Yogyakarta Province, as seen in the construction of several National Strategic Projects. Several regulations have been established to limit the occurrence of the phenomenon of changes in land use, but until this study was conducted (2024) land conversion continues to occur. This study aims to determine the factors causing land conversion along with the implementation of the Sustainable Food Crop Land (LP2B) protection policy in Kulon Progo Regency. The research is qualitative descriptive. The results of the study indicate that the implementation of the LP2B policy has not been fully implemented. The implementation of the LP2B protection policy is considered ineffective so that the government through the Department of Agriculture and Food has made alternative efforts in the form of persuasive socialization and prioritization of subsidies.

Keyword: LP2B, Land Conversion, Kulon Progo